

Layanan Pemakaman di Kota Bandung Sekarang Digratiskan

BANDUNG (IM)- Pemkot Bandung mengungkapkan layanan pemakaman di Kota Bandung gratis terhitung mulai tanggal 4 Januari tahun 2024. Layanan pemakaman tersebut di antaranya pelayanan pemakaman baru, pemakaman tumpang dan heregistrasi.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar), Bambang Suhari, Pemkot Bandung telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu poinnya yaitu dilarang memungut semua jenis retribusi layanan pemakaman.

"Kita semua sudah tahu terbit undang-undang nomor satu tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, retribusi (pemakaman) dihapus dengan perda no 1 tahun 2024. Kami tidak boleh lagi memungut semua jenis retribusi pemakaman," ujar Bambang di Bandung, Jumat (19/1).

Bambang mencontohkan, layanan seperti pelayanan pemakaman baru, tumpang dan heregistrasi gratis. Termasuk biaya pemakaman tanah makan tidak dipungut biaya atau retribusi serta pengantaran jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman.

Bambang mengatakan la-

yanan pemakaman gratis dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Layanan gratis tersebut berlaku di 13 tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah. Pemakaman tersebut yaitu TPU Cibaruay, TPU Pandu, TPU Sinaraga, TPU Rancacili, TPU Malecer, TPU Ciburuy, TPU Gumuruh, TPU Cikutra, Cikadut, TPU Nagrog, TPU Legok Cisereuh, TPU Astana Anyar, Babakan Ciparay.

"Kepala dinas menginstruksikan kepala UPT dan korlap melaksanakan perda dengan baik dan integritas melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," katanya.

Menurutnya, masyarakat yang memerlukan pelayanan pemakaman disarankan menghubungi petugas resmi yaitu petugas PNS. Bambang mengimbau masyarakat tidak menghubungi petugas di luar petugas PNS agar terhindar dari pungutan liar. Bambang menegaskan apabila didapati ASN yang melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan bagi petugas harian lepas akan diputus kontrak dan tidak akan dipekerjakan kembali. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KETERSEDIAAN DARAH DI PMI BANDUNG MENIPIS

Warga mendonorkan darahnya di PMI Kota Bandung, Jabar, Jumat (19/1). PMI Kota Bandung mengalami penurunan ketersediaan darah hingga 60 persen atau hanya memiliki stok 200 labu darah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang dapat mencapai 500 hingga 600 labu darah per hari, akibat minimnya pendonor darah pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Pemkab Perlu Bagi Beban Jalan Khusus Tambang ke Pemprov Jabar

PERBAIKAN dan perawatan jalan Parungpanjang-Bunar yang sehari-harinya dilintasi angkutan khusus tambang itu merupakan bagian dari infrastruktur provinsi Jabar. Untuk mengatasi persoalan ini, koordinasi antara Pemkab Bogor dengan Pemprov Jawa Barat sangat diperlukan.

CIBINONG (IM)- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu membagi beban penanganan jalan angkutan khusus tambang di wilayah Parungpanjang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dalam mengatasi persoalan ini, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten

Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan, terutama terkait perawatan jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi," kata Rudy di Cibinong, Bogor, Jumat (19/1).

Ia menjelaskan, perbaikan dan perawatan jalan Parungpanjang-Bunar yang sehari-harinya dilintasi angkutan khusus tambang merupakan bagian

dari infrastruktur provinsi.

Ia juga menekankan pentingnya intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini disebabkan karena lintasan truk tambang melibatkan wilayah tersebut.

"Koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi kunci penting, mengingat truk tambang juga melintasi daerah tersebut. Upaya bersama lintas daerah dapat menjadi solusi holistik untuk mengatasi dampak dari aktivitas angkutan tambang," paparnya.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah menyediakan kantong parkir truk dalam penan-

ganan polemik lalu lintas angkutan khusus material tambang di Parungpanjang.

"Pembangunan kantong parkir yang telah dioperasikan diharapkan dapat secara bertahap mengurai permasalahan tersebut," tuturnya.

Sementara Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan sebagian kantong parkir yang saat ini dalam proses pembangunan sudah bisa difungsikan untuk menampung sebanyak 50 truk.

"Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor," kata Asmawa.

Ia menerangkan, kantong parkir seluas 4,2 hektare dengan kapasitas 1.000 truk itu dibangun di perbatasan

wilayah Parungpanjang, tepatnya di Desa Ciomas, Tenjo, Bogor. Pembangunannya ditarget selesai pada akhir Januari 2024.

Pembangunan kantong parkir yang dikerjasamakan dengan Perhutani ini dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama ini pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 4,2 hektare.

Secara keseluruhan, total luas lahan yang akan digunakan untuk kantong parkir sekitar 10 hektare yang tersebar di dua lokasi.

Selanjutnya untuk tahap kedua, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membangun kantong parkir di Ruas Jalan Sudamanik, Kecamatan Parungpanjang. Kantong parkir ini nantinya bisa menampung lebih dari 2.000 kendaraan. ● **gio**

Pabrik Ban di Cikarang Tutup, 1.170 Karyawan Terkena PHK

BEKASI (IM)-Sebanyak 1.170 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan ban PT Hung-A Indonesia, Cikarang, Kabupaten Bekasi, tutup. "1.170 orang (kena PHK)," ucap Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayat saat dihubungi, Jumat (19/1).

Nur mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan berkaitan adanya penutupan perusahaan yang mengakibatkan PHK massal. "Pelaporan tutup dan berimbas pada PHK terhadap karyawan disampaikan ke Disnaker itu tanggal 15 Januari 2024," kata dia.

Lebih lanjut, Nur menyampaikan, mayoritas karyawan yang terkena PHK merupakan karyawan tetap. "Mayoritas (karyawan) tetap, tapi untuk detailnya (laporan dari perusahaan) kami juga belum punya," ujar dia.

Adapun perusahaan yang telah berdiri sejak 1991 itu tutup karena tak pernah lagi menerima pesanan. "Tu-

putnya karena memang alasan yang disampaikan sama dengan surat, karena mereka sudah tidak ada order di tahun 2024," tutur Nur.

Disnaker kini mengupayakan untuk melakukan pendampingan kepada ribuan karyawan yang terkena imbas penutupan perusahaan tersebut. Sebelumnya diberitakan, Plt Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), C Heru Widianto menjelaskan, PT Hung-A tutup karena merosotnya jumlah pesanan. "Alasan perusahaan tutup karena order (atau) pesanan berkurang drastis," kata Heru, Kamis (18/1).

Heru menambahkan, perusahaan dan pekerja telah melakukan komunikasi untuk membahas hak-hak yang akan didapatkan karyawan setelah di-PHK. Sebagai informasi, PT Hung-A Indonesia memproduksi berbagai jenis ban untuk kendaraan roda dua dan empat yang mengekspor lebih dari 70 persen produksinya ke Eropa. ● **pp**

IDN/ANTARA



KSPOR PERDANA KERANG ACEH

Pekerja mengangkat keranjang berisi kerang dara saat persiapan ekspor di Kab. Aceh Besar, Jumat (19/1). Pelaku usaha perikanan di daerah itu menyebutkan, ekspor perdana komoditas kerang tahun 2024 tujuan Vietnam hanya terpenuhi 750 kg sementara permintaan pasar luar negeri mencapai 1-3 ton per hari.

Restoran tak Punya Lahan Parkir, Jalan Achmad Adnawijaya Bogor Macet

BOGOR (IM)- Kemacetan terjadi di Jalan Achmad Adnawijaya, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1). Kemacetan terjadi akibat salah satu tempat makan tak punya lahan parkir yang memadai.

Akibatnya, muncul parkir liar menggunakan bahu jalan. Pengunjung yang mencari tempat parkir menyebabkan pengendara di belakangnya harus menunggu.

Seorang warga sekitar bernama Siti (25) menuturkan, kemacetan hampir terjadi setiap hari, terutama pada jam makan siang. "Macet sampai ke depan, karena orang-orang yang mau makan pada cari tempat parkir, apalagi pas siang," tutur Siti di lokasi. Menurut Siti, parkir

liar tersebut pernah ditekankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, juru parkir liar tetap bandel. "Dulu pernah ada petugas Satpol PP datang, tapi ke sini-sini, parkir lagi aja di jalan," kata dia.

Warga lainnya bernama Umar (54) juga mengeluhkan kondisi jalan yang sudah sempit malah digunakan para pemilik kendaraan untuk parkir. "Ini jalan sempit dan miring, aspalnya juga gak rata, jadi makin macet aja kalau nyari parkir," ucap Umar.

Tidak hanya menyebabkan kemacetan, parkir liar ini juga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. "Susah buat jalannya, kami harus melipir ke tengah jalan," tutur Umar. ● **pp**

Pemkab Bekasi Buka Opsi KPBU dalam Bangun Infrastruktur PJU

CIKARANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuka opsi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam upaya pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum atau PJU di daerah itu.

"Pola pembiayaan ini dianggap sebagai solusi mengatasi keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menyangkut persoalan PJU di wilayah Kabupaten Bekasi setiap tahun," kata Staf Ahli Bupati Bekasi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Agus Budiono di Cikarang, Jumat (19/1).

Dia mengatakan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang difasilitasi pemerintah pusat untuk menerapkan skema KPBU atau Public Private Partnership dalam penyediaan infrastruktur penerangan jalan umum.

"Kabupaten Bekasi sudah berproses ke arah sana. Saat ini tahap kajian yang difasilitasi pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan. Tahapan

ini masih panjang, termasuk menyepakati skema KPBU dengan DPRD karena akan berkonsekuensi pada APBD," katanya.

Ia meyakini pembangunan infrastruktur PJU hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bekasi dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat melalui skema ini, sekaligus meringankan beban pembiayaan daerah yang harus diprioritaskan sesuai tahapan tahun anggaran untuk kebutuhan penting lain.

"Kebutuhan PJU bisa dibilang sifatnya mendasar dan sedikit banyak berkorelasi dengan tingkat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Tetapi di sisi lain APBD kita juga terbatas karena banyak infrastruktur lain yang juga harus dianggarkan," katanya.

Agus juga melihat ada manfaat ekonomi yang jauh lebih besar jika skema KPBU ini diberlakukan. Salah satunya menyangkut jam operasional buka usaha bisa lebih lama hingga malam

hari sehingga pertumbuhan ekonomi lokal dapat terus bergerak.

"Daerah yang sudah berjalan itu di Kabupaten Madiun (Jawa Timur). Dengan skema KPBU ini ternyata di sana pengelolaan PJU lebih efisien dan pembayaran juga lebih hemat," ucap dia.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna mengatakan implementasi pola KPBU mampu merelokasi pembiayaan pengadaan dan pemeliharaan PJU untuk pembayaran cicilan kepada Badan Usaha Penjamin (BUP) selaku penyedia layanan penerangan jalan umum selama 10 tahun di 13.000 titik.

"Sekarang masih berproses dan hasil kajian sementara dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia itu kita akan tuntaskan untuk pemasangan sekitar 13 ribu tiang (titik lampu) PJU di Kabupaten Bekasi paling lambat di tahun 2026 atau 2027," kata dia. ● **pp**



IDN/ANTARA

PETERNAK AYAM KELUHAN HARGA PAKAN TINGGI

Peternak ayam memanen telur di Desa Kuwonharjo, Kab. Magetan, Jatim, Jumat (19/1). Menurut peternak ayam, akibat harga jagung lokal yang meningkat, peternak rugi atas Harga Pokok Produksi (HPP) dan harga jual telur yang tidak sesuai, yakni harga telur ditingkat peternak sekitar Rp23.000 per kg sementara HPP sekitar Rp28.000 hingga Rp29.000 per kg.